

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG**

2024

Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung Visi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya*” maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang ikut mewujudkan misi BIKPM yaitu :

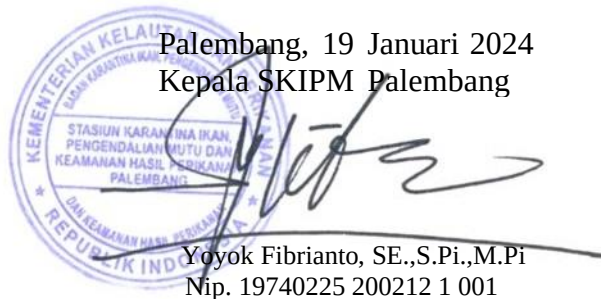
1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Palembang untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Palembang, 19 Januari 2024

Kepala SKIPM Palembang



Yoyok Fibrianto, SE., S.Pi., M.Pi
Nip. 19740225 200212 1 001



Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Grafik

1.	Pendahuluan	1
1.1.	Tugas dan Peran Organisasi	1
1.2.	Tujuan	3
1.3.	Sasaran	3
2.	Rencana Strategis	3
2.1.	Arah Kebijakan	6
2.2.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	7
2.3.	Indikator Kinerja	8
2.4.	Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun KIPM Palembang.....	11
3.	PENUTUP	14



Daftar Grafik

- Grafik 1. Alokasi anggaran Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Palembang perjenis Kegiatan.....11
- Grafik 2. Alokasi anggaran Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil Perikanan Palembang per kegiatan dan per jenis belanja -----13



1. Pendahuluan

1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 dan selanjutnya PERMEN KP Nomor :54/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Nomenklatur UPT Lingkup BKIPM, Undang-undang No.21 tahun 2019, tentang karantina ikan, hewan dan tumbuhan, dan tumbuhan, maka pembangunan BKIPM merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebar hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan

BKIPM dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan



keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/ hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.



1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2024 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana Kinerja dan anggaran BKIPM tahun 2024 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang pada tahun 2024.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan BKIPM adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Palembang Tahun Anggaran 2024 sebagai tindak lanjut dari RPJM BKIPM tahun 2020-2024 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang pada tahun 2024.

2. Rencana Strategis

- Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.



Visi KKP adalah “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata.

Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat serta menetapkan misi antara lain:

- *(Sovereignty)*, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan Kedaulatan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- Keberlanjutan *(Sustainability)*, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- Kesejahteraan *(Prosperity)*, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kontribusi Pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi.

Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan



Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BKIPM dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi pembangunan KIPM adalah “**Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman dan Terpercaya**” serta menetapkan misi

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

- Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah **melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional** dengan sasaran:

- Meningkatnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area).
- Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area.
- Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
- Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta,
- Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.



2.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BKIPM dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, diperlukan upaya melalui strategi:
 - a. Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan
 - b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
 - c. Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan melalui strategi:
 - a. Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI
 - b. Nilai PNBP BKIPM
3. Terselenggaranya sistem perkarantinaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - a. Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar
 - b. Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar
 - c. Sertifikasi HACCP hasil perikanan
 - d. Unit Kinerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu
 - e. Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi

- 
4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
 - a. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan
 - b. Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
 5. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Pengelelolaan sumberdaya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis Kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BKIPM tersebut dibagi dalam tiga perspektif antara lain :

1. Kegiatan Pengendalian Mutu yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, dengan indikator Kinerja yaitu :
 - a. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Palembang (sertifikat)
 - b. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Stasiun KIPM Palembang (Lokasi)
 - c. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Stasiun KIPM Palembang (Produk)
 - d. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Palembang (UPI)

- 
2. Kegiatan Standardisasi Sistem Kepatuhan yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif , dengan indikator Kinerja yaitu :
 - a. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Stasiun KIPM Palembang (nilai).
 - b. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Stasiun KIPM Palembang (Lokasi)
 3. Kegiatan Dukungan manajemen internal Lingkup BKIPM , dengan indikator Kinerja yaitu :
 - a. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Palembang (indeks)
 - b. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun KIPM Palembang (Nilai)
 - c. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)
 - d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)
 - e. Nilai indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Palembang (Nilai)
 - f. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Palembang (Nilai)
 - g. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)
 - h. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)

2.3. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2024. Indikator Kinerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja UPT berdasarkan Balaced Scorecard (BSC) adalah sebagai berikut:



Tabel 1. Indikator Kinerja SKIPM Palembang tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1.	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan Lingkup Stasiun KIPM Palembang (sertifikat)	5
		2.	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik Lingkup Stasiun KIPM Palembang (Lokasi)	2
		3.	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Stasiun KIPM Palembang (Produk)	4
		4.	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	5
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5.	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Stasiun KIPM Palembang (nilai)	84
		6.	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	2
Kegiatan 3. Dukungan manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3. 1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Palembang (indeks)	86
		8	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	82
		9	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)	100
		10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)	80
		11.	Nilai indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	93,75

2024



			Lingkup Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	
		12.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	82
		13.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)	80
		14.	Tingkat kepatuhan BMN Lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)	80

Dalam mewujudkan target indikator Kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan Kinerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut :

1. Pengendalian Mutu
2. Standar-disasi Sistem dan Kepatuhan
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM

Kegiatan Pengendalian Mutu diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan Standar-disasi Sistem dan Kepatuhan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit Kinerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini

didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

2.4. Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun KIPM Palembang

Rencana Kinerja dan anggaran Stasiun KIPM Palembang tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target Kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana Kinerja Stasiun KIPM Palembang dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 6.016.527.000,-

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Palembang tahun 2024 untuk mewujudkan target-target Kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 sebagai berikut.

Grafik 1. Alokasi Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang per jenis KRO





Total rencana alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang pada tahun 2024 sebesar Rp 6.016.527.000,- Alokasi anggaran berdasarkan indikator kegiatan antara lain :

1. Kegiatan pengendalian mutu sebesar Rp 159.350.000 .atau sebesar 2,65 %
2. Kegiatan standarisasi sistem kepatuhan sebesar Rp 706.500.000 atau sebesar 11.74 %
3. Kegiatan dukungan manajemen internal lingkup BKIPM sebesar Rp 5.150.677.000,- atau sebesar 85,60 %

Sedangkan rincian masing-masing kegiatan dituangkan dalam Rincian Output (RO) kegiatan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang, terdiri dari :

1. Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan sebesar Rp 20.700.000
2. Sertifikasi Hazard Anaylis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI sebesar Rp 20.000.000
3. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya sebesar Rp 50.000.000
4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp. 45.600.000
5. Unit Kinerja yang menerapkan sistem manajemen mutu sebesar Rp. 25.000.000
6. Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, system dan regulasi sebesar Rp109.000.000
7. Layanan Umum sebesar Rp. 18.450.000
8. Layanan Perkantoran sebesar Rp. 4.962.739.000
9. Layanan Manajemen SDM sebesar Rp.19.522.000
10. Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 94.454.000
11. Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp. 28.302.00

Grafik 2. Alokasi anggaran Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Palembang per jenis belanja



Total rencana alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang pada tahun 2024 sebesar Rp.6.016.527.000,-. Alokasi anggaran tersebut berdasarkan jenis belanja terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.164.170.000,- atau sebesar 52,59 %
2. Belanja Barang sebesar Rp. 2.852.357.000,- atau sebesar 47,41 %

3. PENUTUP

Program Kinerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2024 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang diimplementasikan dalam rangka penerapan Kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif

- 
5. Terselenggaranya sistem perkarantinaan dan pengendalian keamanan hayati ikan yang sesuai standar
 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.
 7. Terwujudnya aparatur sipil negara pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang yang kompeten, profesional dan berintegritas
 8. Tersedianya manajemen pengetahuan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang yang handal dan mudah diakses
 9. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
 10. Terkelolanya anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang secara efisien dan akuntabel

Total rencana alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.016.527.000,-. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.164.170.000,- atau sebesar 52,59 %
2. Belanja Barang sebesar Rp. 2.852.357.000,- atau sebesar 47,41 %